

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia sebagai suatu yang lahir dari pengalaman kolonialisme sesudah Perang Dunia II telah menjadikan demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini, bahkan tema penting yang selalu dikampanyekan adalah “menegakkan kehidupan demokrasi” yang diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat (Mahfud, 2003:2-3).

Indonesia merupakan suatu negara demokrasi yang menjunjung tinggi asas partisipasi dalam menentukan pemimpin. Partisipasi itu terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memilih pemimpin tersebut. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars*, yang artinya bagian dan *capere* (sipasi) yang artinya mengambil. Bila digabungkan maka artinya mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi partisipasi mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Sahid, 2011:176).

Peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik terlihat dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam memilih pemimpin. Pemilihan pemimpin menjadi salah satu indikator dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Keikutsertaan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana perilaku politik yang ada. Perilaku politik merupakan bentuk dari partisipasi politik yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan publik.

Perilaku politik berkaitan erat dengan kesadaran politik serta kepercayaan politik. Perilaku politik dipengaruhi oleh kepercayaan yang ada didalam masyarakat. Kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil, dan jujur (Blind,2007). Jika institusi pemerintah, pejabat publik, dan kebijakan yang dibuatnya dinilai baik oleh warga maka warga akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Kepercayaan sering diartikan sebagai suatu kondisi dimana warga dapat menyerahkan nasibnya kepada pemerintah dan para pejabat publik karena dianggap akan selalu mengurus kepentingan warga secara baik (Dwiyanto, 2011:355).

Kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah pada umumnya selalu terkait dengan isu isu publik tertentu. Ketika institusi pemerintah dan para pejabatnya mengambil pilihan yang benar dan sesuai dengan harapan dan aspirasinya, maka warga cenderung menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya, ketika respon pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik tertentu dinilai oleh warga sebagai pilihan kebijakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapannya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan

merosot. Kepercayaan publik secara rasional (*rational trust*) terbentuk ketika warga dan para pemangku kepentingan menilai tindakan yang diambil oleh institusi pemerintah dan para pejabatnya sesuai dengan aspirasi dan harapannya (Dwiyanto, 2011: 355-357).

Namun dilihat pada fenomena yang ada pada saat ini umumnya masyarakat kurang menaruh kepercayaan pada pemimpinnya sendiri. Apapun visi-misi yang diterapkan di Indonesia, tidak pernah berjalan dengan semestinya walaupun dengan mencanangkan wacana yang sangat terstruktur. Karena tingkat kepercayaan politik yang sangat rendah, baik dilingkup internal maupun eksternal. Begitupun dengan legitimasi tanpa adanya rasa percaya membuat masyarakat enggan untuk memberikan legitimasinya pada pemerintah.

Menurut Setlig (2013) partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat karena akan berdampak pada jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik tergantung masyarakat. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan.

Berikut tabel yang menyajikan perbandingan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 dan 2015, dimana dalam tabel ini diuraikan tingkat partisipasi masyarakat Tanah Datar berdasarkan kecamatan yang ada.

Tabel 1.1

Data Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bupati Tanah Datar 2010 dan 2015 Menurut Kecamatan

Kecamatan	2010			2015		
	Pemilih Terdaftar	Jumlah Pemilih	Persentase pemilih	Pemilih Terdaftar	Jumlah Pemilih	Persentase Pemilih
X Koto	27.763	16.084	57,93	30.242	14.461	47,81
Batipuh	21.910	12.932	59,02	24.582	11.576	47,09
Batipuh Selatan	7.967	5.058	63,49	8.708	5.379	61,77
Pariangan	15.398	9.246	60,04	17.111	9.018	52,70
Rambatan	25.978	15.936	61,34	28.156	15.332	54,45
Lima Kaum	24.941	16.313	65,40	26.677	16.218	60,79
Tanjung Emas	15.714	10.538	67,06	17.310	10.684	61,72
Padang Ganting	9.619	6.414	66,68	10.239	5.708	55,74
Lintau Buo	12.063	8.217	68,11	13.603	8.343	61,33
Lintau Buo Utara	25.741	16.939	65,80	27.952	17.319	61,96
Sungayang	12.439	7.861	63,20	12.975	7.889	60,80
Sungai Tarab	22.998	13.961	60,70	25.067	12.869	51,34
Salimpaung	15.707	9.079	57,80	16.408	8.188	49,90
Tanjung Baru	9.603	6.136	63,89	10.441	6.081	58,24
Kab.Tanah Datar	247.841	154.714	62,42	269.470	149.068	55,32

Sumber : KPUD Tanah Datar

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah pemilih terdaftar pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar 2010 sebanyak 247.841 pemilih dengan yang ikut memilih sebanyak 154.714 pemilih dan yang tidak ikut memilih 93.125 pemilih. Angka tersebut membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2010 tergolong rendah, karena hanya 62,42% masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah 2010.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 ini, ternyata tingkat partisipasi pemilih bukan semakin meningkat tetapi semakin menurun, bisa kita lihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2010 partisipasi masyarakat sebesar 62,42% turun ke angka 55,32% pada tahun 2015. Hal ini juga

sejalan dari total persentase partisipasi pemilihan secara nasional pada pemilu pada serentak tahun 2015 yang hanya mencapai 77,5 % dan tingkat partisipasi Provinsi Sumatera Barat dalam pemilu pada serentak tahun 2015 sebesar 63 %. Menurut penuturan ketua KPU pusat Husni Kamil Manik seperti dilansir (CNN Indonesia, 7 Agustus 2016) bahwa tingkat partisipasi yang ada pada pemilu pada serentak tahun 2015 tergolong rendah. Hal serupa juga disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Sumampow seperti dilansir (CNN Indonesia, 10 Desember 2015) partisipasi pemilih secara nasional pada pemilu pada tahun 2015 cenderung rendah.

Dari data 2015 tersebut terlihat bahwa hasil keseluruhan yang ikut memilih hanya sebanyak 55,32 % pemilih yang menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala daerah. Hampir setengah dari pemilih terdaftar tidak ikut serta dalam memberikan hak suara mereka. Jika dibandingkan data 2010 dan 2015 diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat tidak meningkat tetapi semakin menurun, rata-rata diseluruh kecamatan partisipasi masyarakat tahun 2015 tergolong rendah, banyak masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, padahal dalam pemilihan ini antusias masyarakat sangat diperlukan untuk perbaikan daerah mereka sendiri.

Rendahnya partisipasi yang terjadi di setiap daerah bahkan di Indonesia sekalipun melihatkan bahwa masyarakat kurang menaruh harapan dan kepercayaan pada pemerintah yang disebabkan berbagai alasan seperti maraknya korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan, sehingga berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Begitupun halnya dalam

pemilukada di Kabupaten Tanah Datar. Karena itu yang diperlukan untuk membangun pemerintahan yang efektif, peduli terhadap kepentingan masyarakat dan demokratis adalah mengelola kepercayaan masyarakat secara optimal.

Peningkatan kepercayaan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemilukada. Persepsi masyarakat terhadap ketulusan kepala daerah dalam memimpin perlu dikelola sedemikian rupa dengan baik untuk mendorong hubungan antara warga dan pemerintah agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan demokratis. Jika pemerintahan sebelumnya sesuai dengan harapan masyarakat banyak tentu masyarakat akan selalu percaya apa yang akan dilakukan pemimpinnya kedepan, karena bagi masyarakat sendiri mereka menilai dengan apa yang mereka lihat sehingga keputusan akhirnya yang menentukan masyarakat mau untuk memberikan legitimasinya kepada kepala daerah melalui pemilu atau sebaliknya.

Secara keseluruhan data partisipasi di Kabupaten Tanah Datar tergolong rendah, namun disini peneliti ingin melihat daerah-daerah yang partisipasinya tergolong tinggi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KPU Kabupaten Tanah Datar tanggal 2 Februari 2016 pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa target persentase tingkat partisipasi pemilih pada pemilukada 2015 60/70 tiap daerah. Hal ini menarik karena dalam penurunan angka partisipasi secara keseluruhan di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010 ke 2015 ada beberapa daerah partisipasinya cukup tinggi, salah satunya Nagari Labuah, Kecamatan Lima

Kaum. Kecamatan Lima kaum merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Secara administrasi pemerintahan, kecamatan Lima Kaum terbagi dalam 5 nagari, yaitu Baringin, Cubadak, Labuah, Lima Kaum, dan Parambahan. Berdasarkan data per nagari yang peneliti dapatkan ternyata partisipasi tertinggi di Kabupaten Tanah Datar dilihat dari tingkat nagari berada di Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum. Berikut tabel tingkat partisipasi Kecamatan Lima Kaum.

Tabel 1.2
Data Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bupati Tanah Datar 2015
Berdasarkan Tingkat Nagari di Kecamatan Lima Kaum

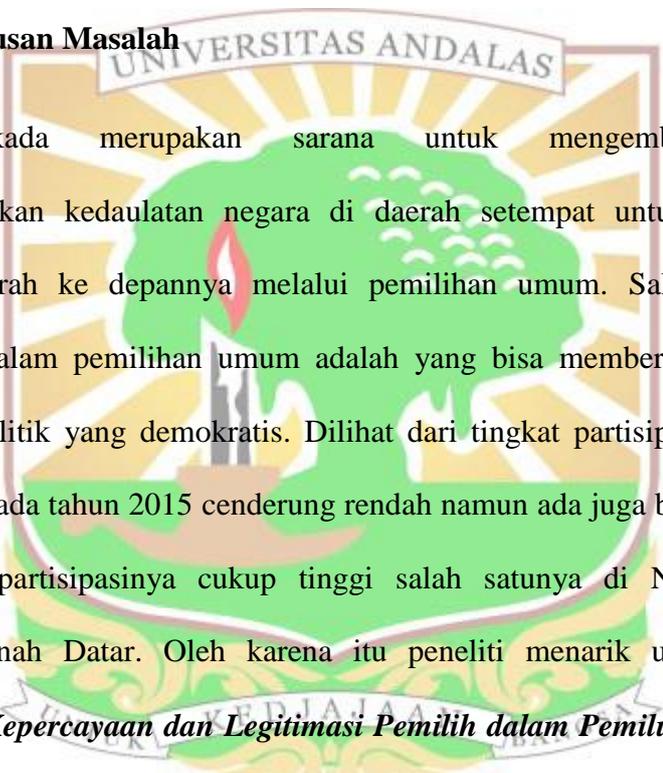
Nagari	Pemilih Terdaftar	Jumlah Pemilih	Persentase Pemilih
Baringin	10.770	6.331	58,78%
Cubadak	2.319	1.613	69,55%
Labuah	1.547	1.115	72,07%
Lima Kaum	10.237	5.886	57,49%
Parambahan	1.804	1.273	70,56%
Jumlah	26,677	16.218	60,79 %

Sumber : KPUD Tanah Datar

Berdasarkan tabel 1.2, maka dapat dilihat bahwa persentase paling tinggi adalah Nagari Labuah dengan persentase 72,07%, ini terlihat bahwa masyarakat di Nagari Labuah cukup antusias dalam pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember yang lalu. Kondisi ini menarik bagi peneliti untuk melihat apa yang mendasari tingkat partisipasi masyarakat Nagari Labuah cukup tinggi pada pemilukada 2015. Tidak hanya itu peneliti juga menarik untuk melihat, disamping hal yang mendasar tingginya partisipasi, peneliti juga ingin tahu bagaimana masyarakat memberikan legitimasi kepada calon sehingga muncul *trust* dari masyarakat kepada salah satu calon pada pemilukada 2015. Dalam penelitian ini

peneliti menarik untuk mengangkat topik ini agar mengetahui bagaimana kepercayaan dan legitimasi pemilih pada pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Tanah Datar. Hasil ini mungkin juga tidak terlepas dari pandangan masyarakat menilai pasangan calon yang mereka pilih dalam pemilihan umum kepala daerah karena pentingnya hak pilih mereka dalam pemilu menentukan kemajuan daerah untuk kedepannya.

1.2 Perumusan Masalah



Pemilukada merupakan sarana untuk mengembangkan dan menyelenggarakan kedaulatan negara di daerah setempat untuk menentukan pemimpin daerah ke depannya melalui pemilihan umum. Salah satu aspek keberhasilan dalam pemilihan umum adalah yang bisa memberikan kontribusi bagi sistem politik yang demokratis. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada tahun 2015 cenderung rendah namun ada juga beberapa daerah yang tingkat partisipasinya cukup tinggi salah satunya di Nagari Labuah, Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu peneliti menarik untuk mengkaji *“Bagaimana Kepercayaan dan Legitimasi Pemilih dalam Pemilukadadi Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar”*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah bagaimana kepercayaan dan legitimasi masyarakat pemilih terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati

Tanah Datar dalam pemilukada tahun 2015 di Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemilukada di Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
2. Mendeskripsikan kepercayaan dan legitimasi yang mempengaruhi tingginya partisipasi di daerah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin sosial, terutama tentang masalah tingkat partisipasi pemilih dalam pemilukada.

2. Aspek Praktis

- Menginspirasi para pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada daerah-daerah yang rendah partisipasinya.
- Sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti lain yang tertarik kepada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Sebagai bahan acuan penelitian yang lebih Injut agar dapat lebih baik dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Kepercayaan

Kepercayaan adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu (Fukuyama, 2002:36). *Trust* berarti kepercayaan, keyakinan atau juga rasa percaya, sebagai kata kerja *trust* berarti proses mempercayai sesuatu yang jelas sasarannya. Menurut Ba dan Pavlou (Rofiq, 2007:32) kepercayaan (*trust*) adalah hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu menurut harapan orang kepercayaannya dalam suatu lingkungan yang penuh ketidak-pastian. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya.

Trust adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut memiliki segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan (Rofiq, 2007:32). Kepercayaan publik yang bersifat rasional (*rational trust*) terbentuk ketika warga dan para pemangku kepentingan menilai tindakan yang diambil oleh institusi pemerintah dan para pejabatnya sesuai dengan aspirasi dan harapannya (Dwiyanto, 2011:359). Dalam kaitannya dengan pemilu kepercayaan sangat mempengaruhi bagaimana tindak lanjut dalam partisipasi, karena tanpa ada rasa percaya dari seorang pemilih, masyarakat akan enggan untuk ikut aktif dalam kegiatan negara seperti pemilu. Kepercayaan adalah modal

sosial masyarakat untuk ikut pemilihan kepala daerah, karena kepercayaan merupakan induk dari pengharapan masyarakat agar mereka dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka untuk kemajuan daerah kedepannya.

1.5.2 Legitimasi

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu wewenang (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan). Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society* wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan. Legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau pengusaha adalah wajar dan patut dihormati. Dalam hubungan ini dikatakan oleh David Easton bahwa keabsahan atau legitimasi adalah keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan mentaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu (Budiardjo, 2008:64-65).

Menurut konsep Max Weber mengenai otoritas absah mengarahkan pada hubungan antara kepercayaan terhadap legitimasi sebuah tatanan (*ordnungen*) beserta kemampuannya untuk menjustifikasi di satu sisi, dan kesahihan faktualnya di sisi lain (Habermas, 2004:274). Kewenangan dikatakan ada ketika kepatuhan itu diberikan atas dasar keyakinan atau kepercayaan terhadap legitimasi atau

keabsahan dari perintah itu. Maka kekuasaan dan dominasi yang memiliki legitimasi akan menjadi sebuah kewenangan.

Seperti halnya dalam pemilu, legitimasi berkaitan erat dengan pemilu. Ini disebabkan karena tanpa adanya legitimasi dari masyarakat untuk pemerintah, pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan perintah dan membuat aturan. Dalam hubungannya legitimasi adalah keyakinan masyarakat untuk mau menerima dan mengakui kewenangan dari pemerintah itu sendiri. Sehingga dengan adanya legitimasi masyarakat memberikan wewenang kepada calon yang ia pilih untuk menggunakan wewenang tersebut memimpin pemerintahan dan menggunakannya untuk membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

1.5.3 Pemilihan Umum

Dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu ditanggapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang bersifat kesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya (Budiardjo, 2008:461).

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-

jabatan disini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala daerah (Jurnal Konstitusi, 2009:102). Pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah dan sistem politik yang berlaku.

Pemilukada merupakan tahapan dari proses pemilu yang dilaksanakan untuk pemilihan kepala daerah yang ada di provinsi masing-masing di Indonesia. Sehingga pemilukada merupakan proses pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh masyarakat yang berada di daerah tersebut. Sehingga dengan adanya pemilukada masyarakat di daerah berhak untuk menentukan dan memilih kepala daerah sesuai dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri.

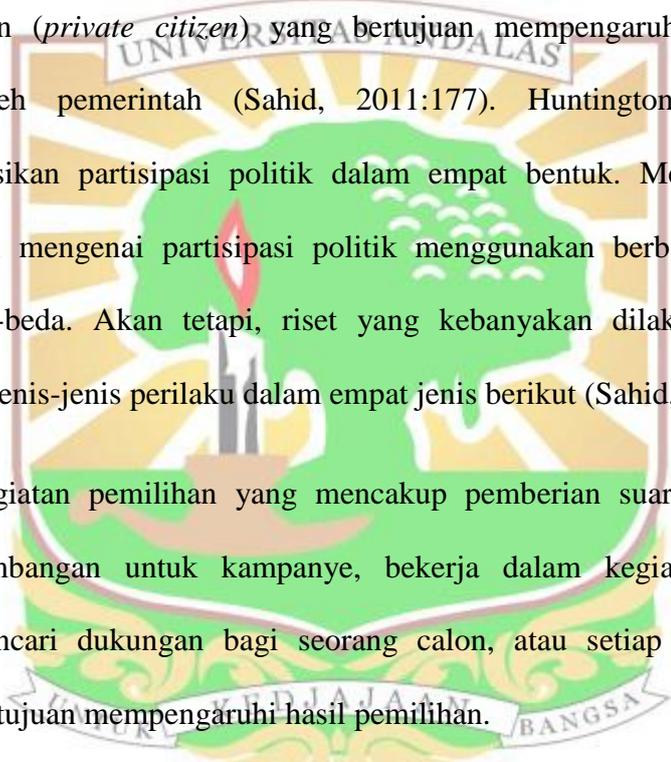
1.5.4 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Budiardjo, 2008 :367).

Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang sukarela, penuh kesadaran, tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Partisipasi politik

merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis (Miaz, 2012:23). Partisipasi politik adalah bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi politik, rakyat ikut serta menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan dan menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan rakyat dengan memberikan hak suara.

Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Sahid, 2011:177). Huntington dan Nelson mengklasifikasikan partisipasi politik dalam empat bentuk. Menurutnya, dari berbagai studi mengenai partisipasi politik menggunakan berbagai klasifikasi yang berbeda-beda. Akan tetapi, riset yang kebanyakan dilakukan sekarang membedakan jenis-jenis perilaku dalam empat jenis berikut (Sahid, 2011:182).

- 
- a. Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.
 - b. *Lobbying* yang mencakup upaya-upaya, baik perorangan maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil.
 - c. Kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah

- d. Mencari koneksi (*contacting*), yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat baik hanya seseorang atau beberapa orang.

1.5.5 Perspektif Sosiologis

Dalam melihat kepercayaan dan legitimasi pemilih dalam pilkada Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 menggunakan perspektif sosiologis dalam paradigma defenisi sosial yang dijelaskan oleh Max Weber mengenai Legitimasi dan diperkuat dengan *trust* oleh Fukuyama.

Inti kepercayaan antar manusia ada tiga hal yang saling terkait yaitu hubungan sosial antara dua orang atau lebih, harapan yang terkandung dalam hubungan sosial, kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak, interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud (Lawang, 2004:46). Dalam buku yang berjudul *Trust: The social Virtues and the Creation of Prosperity* penulis mendefenisikan *trust* yaitu “*the expectation that arises mithin a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly shared norms, on the part other members of communtiy*” (Fukuyama, 1995:26) yaitu kepercayaan adalah harapan yang timbul dalam masyarakat perilaku yang teratur, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma-norma umum bersama, pada bagian anggota lain dari komunitas itu.

Fukuyama mengatakan bahwa saling percaya (*trust*) merupakan elemen inti dari modal sosial. *Social capital is a capability that aries from the prevalence*

of trust in a society or in certain parts of it (Fukuyama, 1995:26) yaitu modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari kelaziman kepercayaan di masyarakat atau bagian-bagian tertentu. Artinya, bila pembangunan dalam segala aspek ingin berhasil, maka pembangunan tersebut harus didasari oleh adanya kesediaan saling percaya (*trust*). Modal sosial tidak dapat diperoleh hanya dengan individu bertindak sendiri, tetapi hal ini didasarkan pada kebajikan sosial.

Menurut konsep Max Weber mengenai otoritas absah mengarahkan pada hubungan antara kepercayaan terhadap legitimasi sebuah tatanan (*ordnungen*) beserta kemampuannya untuk menjustifikasi di satu sisi, dan kesahihan faktualnya di sisi lain (Habermas, 2004:274). Kewenangan dikatakan ada ketika kepatuhan itu diberikan atas dasar keyakinan atau kepercayaan terhadap legitimasi atau keabsahan dari perintah itu. Maka kekuasaan dan dominasi yang memiliki legitimasi akan menjadi sebuah kewenangan

Sistem wewenang adalah struktur hak. Hak-hak itu mempunyai karakter sosial yang semua hak mempunyainya. Hak-hak itu ada karena konsensus pelaku-pelaku yang relevan, yaitu semua orang menjadi bagian dari sistem. Dalam hubungannya dengan sistem wewenang, konsensus inilah yang dimaksud dengan legitimasi wewenang (Coleman, 2008:565). Seseorang dapat memiliki kewenangan, dengan terlebih dahulu memiliki legitimasi dalam menentukan suatu kebijakan untuk kepentingan sebuah lembaga. Legitimasi politik berperan untuk memberi pengakuan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dimana kebijakan politik itu disahkan.

Teori revolusi memandang titik kritis dalam sebuah perjuangan revolusioner sebagai titik ketika sistem-sistem wewenang yang ada kehilangan legitimasi dimata rakyat atau segmen-segmen penting rakyat. Dalam hubungannya, wewenang adalah hak untuk mengontrol tindakan-tindakan pelaku lain, dan kekuasaan adalah kapasitas untuk berbuat demikian, dengan atau tanpa hak itu. Karakter konsensual haklah yang menciptakan kesesuaian antara hak untuk menggunakan kontrol dengan legitimasi tindakan-tindakan otoritatif. Hak untuk menjalankan suatu tindakan ada jika ada konsensus umum bahwa pelaku khusus yang dibicarakan mempunyai hak untuk menjalankan tindakan itu (Coleman, 2008:576).

Ada 3 jenis kewenangan yang dapat dibedakan berdasarkan klaimnya atas legitimasi :

- a. Kewenangan tradisional, yaitu kekuasaan dan dominasi oleh waktu, yaitu karena ia sudah ada sejak lama atau dengan kata lain karena disucikan oleh tradisi.
- b. Kewenangan karismatik, yaitu kekuasaan dan dominasi yang dilegitimasi oleh karakteristik kepemimpinan pribadi dari sang pemegang kewenangan.
- c. Kewenangan legal rasional, yaitu kekuasaan dan dominasi yang dilegitimasi oleh aturan-aturan formal dan hak dari mereka yang mendapatkan kewenangan untuk memberikan perintah sesuai dengan aturan aturan itu (Eva Etzioni, hal 41).

Pada hakikatnya konsep otoritas legal Max Weber mengacu pada otoritas legal yang rasional, dan dalam kenyataannya merujuk pada otoritas legal rasional yang berorientasi nilai (Habermas 2004:283). Apabila *trust* (Fukuyama) dikaitkan dengan teori legitimasi Max Weber maka legitimasi berarti melihat seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Legitimasi masyarakat ini bisa berupa kepercayaan mereka terhadap pemimpin yang mereka pilih dalam pemilihan Kabupaten Tanah Datar karena kepercayaan adalah inti dari modal sosial.



1.5.6 Penelitian Relevan

Tabel. 1.3
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Nama/ tahun	Judul	Hasil Penelitian
Leni Aulia/ 2009	Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Wali Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Canduang Kabupaten Agam Periode 2008-2014	Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan wali nagari ampang gadang adalah jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, serta pengetahuan tentang proses penyelenggaraan pemilihan dan waktu pelaksanaan pemilihan termasuk didalamnya tentang pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilihan wali nagari
Junaidi/ 2011	Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Barat pada Pemilu dan Pilkada	Partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh hal-hal teknis seperti adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, minimnya sosialisasi oleh pemerintah Komisi Pemilihan Umum, dan terbentuknya sikap sinisme masyarakat sebagai akibat kekecewaan masyarakat terhadap hasil pemilu-pemilu sebelumnya
Qamaru Zaman/ 2013	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya Dalam Pilkada Langsung Di Kota Surabaya	Persepsi masyarakat dalam pilkada Pilkada langsung di Kota Surabaya dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu positif, negatif, dan ragu-ragu.
Desty Sartika Putri/ 2016	Kepercayaan Dan Legitimasi Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Datar	Kepercayaan dan Legitimasi Pemilih dalam pemilukada Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada kewenangan yang mengarahkan pada kepercayaan yang diakui secara legitimasi.

Dari tabel 1.3 dapat dilihat adapun kesamaan dan perbedaan yang dapat dilihat dengan penelitian ini, penelitian-penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang partisipasi politik, pemilihan umum, hanya saja pada penelitian oleh Leni Aulia diarahkan pada pemilihan wali nagari dan langsung mengaitkan bagaimana hubungan partisipasi politik dengan jenis pekerjaan, tingkat pengetahuan masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan wali nagari.

Penelitian oleh Junaidi lebih melihat kepada partisipasi masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan yang mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Penurunan partisipasi ini disebabkan oleh hal-hal teknis seperti adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan tetap, minimnya sosialisasi oleh pemerintah Komisi Pemilihan Umum, selain itu terbentuknya sikap sinisme masyarakat sebagai akibat kekecewaan mereka terhadap perilaku pemilu yang mereka pilih melalui pemilu-pemilu sebelumnya.

Pada penelitian Qamaru Zaman penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat dalam Pilkada langsung di kota Surabaya dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu positif, negatif dan ragu-ragu. Persepsi positif diperoleh oleh masyarakat yang berpendidikan, mapan ekonomis, seperti tokoh masyarakat. Alasan dari persepsi positif ini karena sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi kerakyatan dan mereka merasa dapat menilai calon pemimpin secara langsung. Berbeda dengan masyarakat yang berpresepsi negatif yang kebanyakan orang tua, pedagang yang tidak menetap, dan tokoh agama, mereka menganggap pilukada hanya *money politik* yaitu hanya uang yang menjadi penentu. Masyarakat juga mengatakan bahwa mereka tidak mengenal pasangan calon dari yang

akan memimpin daerahnya sehingga mereka tidak bisa menentukan pilihan. Sedangkan kelompok yang ke 3 ini adalah pedagang, tukang parkir, tukang becak, dan sebagian mahasiswa, mereka tidak memilih dengan alasan ekonomi, takut tidak mendapat penghasilan pada hari pemilu tersebut.

Penelitian yang telah peneliti lakukan lebih banyak mengkaji bagaimana kepercayaan dan legitimasi masyarakat di Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, karena berdasarkan data yang didapat partisipasi pemilih secara keseluruhan di Kabupaten Tanah Datar tergolong rendah, namun pada suatu daerah masih ada partisipasi masyarakat yang tergolong tinggi. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji bagaimana kepercayaan dan legitimasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Tanah Datar yang diadakan pada tahun 2015 didasarkan pada kewenangan yang mengarahkan pada kepercayaan yang diakui secara legitimasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan dan tulisan) dan perbuatan manusia, bukan dengan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2008:14). Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail sehingga peneliti bisa memperoleh data melalui teknik pengumpulan

data, yang kemudian data yang didapatkan diolah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu temuan baru yang menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih, karena pendekatan penelitian kualitatif mampu menjelaskan secara detail bagaimana masyarakat di Nagari Labuah, Kabupaten Tanah Datar memberikan legitimasi yang kemudian muncul *trust* dari masyarakat terhadap pasangan calon yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat Nagari Labuah dalam pemilukada tahun 2015. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci berupa kata- kata pada saat wawancara mendalam mengenai keadaan yang sebenarnya dalam memberikan kepercayaan kepada calon tertentu sehingga tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi di Nagari Labuah.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghitung fakta, tetapi tidak melakukan pengajuan hipotesa (Singarimbun, 1995: 4). Jadi, menurut peneliti metode ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena mampu menggambarkan permasalahan secara sistematis mengenai kepercayaan dan legitimasi pemilih dalam pemilukada kabupaten Tanah Datar.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi penelitian, karena itu diharapkan informan adalah orang yang benar-benar paham dengan segala situasi dan kondisi penelitian dan menguasai permasalahan penelitian (Moleong, 2010:90). Informan merupakan individu atau orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan keterangan, dan data untuk keperluan peneliti (Koentjaraningrat, 1994:130) .

Untuk menentukan informan yang akan diambil, maka peneliti memakai teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014:140).

Teknik ini dipilih berdasarkan anggapan dan pengetahuan penelitian bahwa informan yang dipilih dapat menjelaskan masalah penelitian yaitu mengenai apa saja yang mempengaruhi tingginya tingkat kepercayaan dan legitimasi masyarakat disuatu daerah di lihat dari minimnya antusias masyarakat secara keseluruhan dalam pemilukada kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini informannya adalah masyarakat nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, karena menurut hasil data pemilukada 2015 yang di dapat dari KPU Kabupaten Tanah Datar, nagari Labuah memiliki jumlah

partisipasi tertinggi dalam pemilihan umum kepala daerah 2015. Oleh karena itu peneliti menetapkan kriteria informan yang akan di wawancarai sebagai berikut :

1. Informan terdaftar di daftar pemilih tetap di Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar
2. Informan ikut menggunakan hak pilih pada pilukada Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 dan 2015
3. Informan berdasarkan jenjang pendidikan SMA sampai Sarjana dan berumur 25-65 tahun.

Dalam penelitian ini, jumlah masyarakat pemilih yang menjadi informan sesuai dari kriteria yang sudah ditetapkan adalah 12 orang informan yang terdiri dari, 12 orang yang terlibat langsung sebagai pemilih dalam pilukada tahun 2015 dan berpendidikan terakhir sebagai lulusan SMA sampai dengan sarjana, peneliti beralasan bahwa masyarakat yang mempunyai jenjang pendidikan yang lebih tinggi biasanya mempunyai wawasan yang lebih luas mengenai pilukada dan masyarakat yang berumur 25-65 tahun memiliki pengalaman dalam pilukada, selanjutnya 2 orang komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tanah Datar dan 1 orang tokoh masyarakat yaitu Sekretaris Pemerintah Nagari Labuah sebagai informan triangulasi. Sehingga dengan memilih informan dari masyarakat dan pegawai pemerintahan nagari serta pegawai KPUD Kabupaten Tanah datar peneliti mendapatkan informasi terkait pertanyaan penelitian. Adapun jumlah informan penelitian bisa dilihat pada tabel 1.4 berikut ini

Tabel 1.4

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Ket
1.	Rinaldi	25	Sarjana Ekonomi	Pemilih aktif
2.	Mardius	61	Diploma 3 Pendidikan	Pemilih aktif
3.	Afrianto	30	SMA	Pemilih aktif
4.	Jumarlis	64	PGA 6 Tahun	Pemilih aktif
5.	Zulfikri	48	SLTA	Pemilih aktif
6.	Eva Wenti	38	Diploma 2 PGTKA	Pemilih aktif
7.	Sri Yeti	34	SMA	Pemilih aktif
8.	Nofrianto Persada	35	Sarjana Pendidikan	Pemilih aktif
9.	Ariyanti Lukman	39	Sarjana Pendidikan	Pemilih aktif
10.	Adriwan S.P	52	Sarjana Pertanian	Informan pengamat
11.	Wilfiandri S.H	46	Sarjana Hukum	Informan pengamat
12.	FeriIswandi S.Sos	42	Sarjana Sosial	Informan pengamat

1.6.3 Data yang Diambil

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Loftland dalam Moleong menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata orang yang diamati dan diwawancarai merupakan data yang utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman *video/audio tapes*, dan mengambil foto atau film (Moleong, 2010:10).

Dalam penelitian ini data-data yang diambil di lapangan tentunya data-data yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu kepercayaan dan legitimasi pemilih dalam pemilu. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang menjadi informan peneliti dengan cara, wawancara secara mendalam, yaitu yang dilihat dari tujuan penelitian.

Adapun data primer yang akan diambil adalah :

1. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pemilu di Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar
2. Kepercayaan dan legitimasi masyarakat mempengaruhi tingginya partisipasi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, koran, majalah, artikel, website atau studi dokumen yang diperoleh dari instansi terkait yang akan menunjang penelitian mengenai kepercayaan dan legitimasi pemilih dalam pemilu kabupaten Tanah Datar. Data sekunder yang dimaksud yaitu semua data yang diperoleh melalui internet, studi kepustakaan, undang-undang maupun peraturan pemerintahan, serta dilengkapi dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tentu saja mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah data dari KPUD

Kabupaten Tanah Datar, literatur, website, jurnal ilmiah, Penelitian terdahulu dan dokumentasi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data yang Digunakan

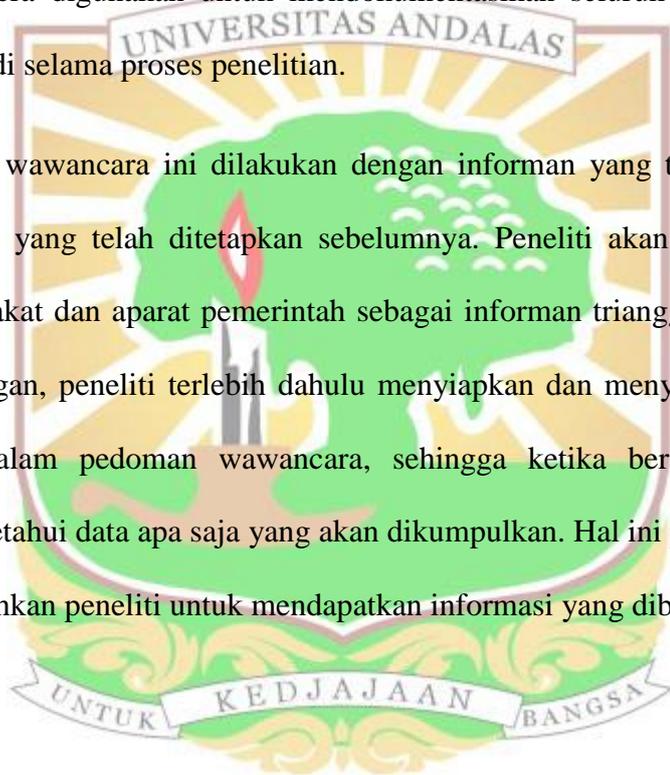
Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010:135).

Wawancara mendalam dapat dilakukan dengan cara pertemuan langsung dengan informan untuk mengumpulkan informasi dan data dari hasil percakapan dengan informan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dapat dilakukan secara bebas dan mendalam yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang berisikan pemikiran yang berupa pertanyaan mendalam yang akan ditanyakan sewaktu wawancara.

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri karena didalam penelitian, peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitiannya. Alat yang digunakan dalam melakukan wawancara mendalam adalah dengan seperti daftar pedoman wawancara rekaman media *handphone*, pena, buku catatan, dan kamera.

- a. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.
- b. Rekaman media *handphone* digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung.
- c. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang diberikan oleh informan.
- d. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa yang terjadi selama proses penelitian.

Proses wawancara ini dilakukan dengan informan yang telah ditentukan sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti akan mewawancarai tokoh masyarakat dan aparat pemerintah sebagai informan triangulasi. Sebelum turun lapangan, peneliti terlebih dahulu menyiapkan dan menyusun data yang dibutuhkan dalam pedoman wawancara, sehingga ketika berada dilapangan peneliti mengetahui data apa saja yang akan dikumpulkan. Hal ini peneliti lakukan guna memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.



Tabel 1.5
Teknik Pengumpulan Data

No	Data Yang Akan Diambil	Teknik Pengumpulan Data	Informan
1	Profil pemilih terdaftar yang melakukan pemilihan kepala daerah di nagari Labuah, kecamatan Lima Kaum	Wawancara mendalam	Pemilih
2	Pemahaman masyarakat tentang pemilukada	Wawancara mendalam	Pemilih
3	Kepercayaan dan legitimasi mempengaruhi tingginya partisipasi	Wawancara mendalam	Pemilih, Tokoh Masyarakat atau Aparat Pemerintah

Sumber: Data Primer 2016

1.6.5 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data yang dilakukan secara intensif medio bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2016. Dalam proses penelitian peneliti memulai penelitian dengan meminta surat izin penelitian ke kantor KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) di Kabupaten Tanah Datar. Setel itu peneliti melanjutkan dengan melihat daerah sekitar nagari Labuah dan mendatangi kantor Wali Nagari untuk meminta izin penelitian di daerah tersebut. Sambutan awal dari masyarakat setempat sangat baik kepada peneliti dalam rangka melakukan penelitian ini. Dimulai dari tanggal 14 mei hingga 29 mei 2016 peneliti melakukan wanwancara mendalam dengan informan, dalam proses penelitian masyarakat setempat umumnya dengan terbuka mau untuk dimintai informasi

serta pendapat mereka mengenai pemilukada yang diadakan pada tahun 2015 lalu. Penelitian ini dilakukan ditempat tinggal informan, warung sebelah rumah, dan diteras rumah informan. Wawancara yang dilakukan dengan informan umumnya berjalan dengan kondusif.

Dari tanggal 31 mei hingga 1 juni 2016 melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat serta *stakeholder* dalam pemilukada di Kabupaten Tanah Datar, tokoh masyarakat seperti sekretaris nagari dengan tangan terbuka bersedia untuk dimintai informasi seputar masyarakat yang ada di Nagari Labuah, beliau juga mempermudah peneliti dengan memberikan data-data yang peneliti butuhkan begitupun dengan pegawai KPUD Tanah Datar tidak mempersulit peneliti untuk dimintai keterangan seputar pemiliahhan kepala daerah baik secara wawancara mendalam yang dilakukan maupun data-data yang peneliti butuhkan. Dalam proses pengumpulan data kemudahan seperti dalam meminta dokumen peneliti tidak mendapatkan kendala untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu tokoh masyarakat juga memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang peneliti angkat.

Pada saat proses pengumpulan data di lapangan peneliti juga mendapatkan kendala dalam proses wawancara mendalam ada beberapa masyarakat yang tidak mau menjadi informan karena berbagai alasan yang tidak diberikan kepada peneliti. Kendala terakhir, umumnya masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, karena mereka pada pagi hari sudah pergi untuk berladang dan ke pasar jadi daerah tersebut sepi sehingga peneliti kesulitan dalam menemui informan meskipun sudah melakukan janji sebelumnya untuk

melakukan wawancara, namun secara keseluruhan penelitian ini berproses dengan lancar.

1.6.6 Unit Analisis

Pada sebuah penelitian, unit analisis digunakan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan dengan pengertian lain obyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu, yaitu masyarakat yang terdaftar dan ikut menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pada kabupaten Tanah Datar.

1.6.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut *Bogdan dan Biklen* analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010:248).

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas-aktivitas seorang peneliti dalam mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok data tersebut (Moleong, 2010:180). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data.

Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan konsep Miles dan Huberman yaitu kodifikasi data, kategorisasi data, lalu menarik kesimpulan. Pada kodifikasi data peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan mengenai pemilukada yang diadakan pada tahun 2015. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting terkait dengan kepercayaan dan legitimasi pemilihan dalam pemilukada Kabupaten Tanah Datar. Sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting.

Dalam kategorisasi data, peneliti melakukan pengelompokan data ke dalam klasifikasi-klasifikasi berdasarkan kodifikasi data sebelumnya. Setelah informasi dipilah kemudian diklasifikasikan untuk menjawab tujuan penelitian kemudian hasil dari klarifikasi tersebut tergambar kesimpulan sementara yang mampu menjawab dari tujuan penelitian. Kemudian peneliti menarik kesimpulan, dengan mencari hubungan-hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat dan disimpulkan sementara dengan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif serta dianalisa secara kualitatif untuk mendeskripsikan apa saja yang mempengaruhi kepercayaan dan legitimasi dalam pemilukada Kabupaten Tanah Datar.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Dalam pemilihan lokasi penelitian ini peneliti berpedoman kepada data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tanah Datar yang mana dalam data tersebut ditemui tingkat partisipasi

pemilih di Nagari Labuah tergolong cukup tinggi pada pemilukada 2015 dibandingkan dengan nagari lain di Kabupaten Tanah Datar, sehingga peneliti tertarik untuk memilih Nagari Labuah menjadi lokasi penelitian mengenai kepercayaan dan legitimasi pemilih dalam pemilukada Kabupaten Tanah Datar.

1.6.9 Operasional Konsep

Ada beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini, defenisi konsep ini merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam menetapkan konsep konsep rujukan.

1. Kepercayaan :keyakinan yang tumbuh didalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama-sama.
2. Legitimasi : seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin.
3. Pemilih : semua pihak yang menjadi tujuan utama para calon pemimpin untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberika suaranya kepada calon pemimpin yang bersangkutan
4. Pemilihan Umum: proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, seperti Gubernur, Bupati atau Wali Kota.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan terhitung dari Mei sampai dengan Juni 2016, kemudian dilanjutkan penulisan draft skripsi setelah mendapatkan data di lapangan, dimana uraian kegiatan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6

Jadwal Penelitian

NO	Nama Kegiatan	2016						
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1.	Mengurus izin penelitian	■	■	■				
2.	Membuat pedoman wawancara	■	■					
3.	Penelitian lapangan - Mengunjungi informan - Wawancara	■	■					
4.	Analisis data - Kodifikasi data - Penyajian data		■	■	■			
5.	Penulisan Draft Skripsi			■	■	■	■	
6.	Ujian Skripsi							■